Jipmor: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Humaniora
https://journal.mellbaou.com/index.php/jipmor
Vol. 4, No. 2, 2026
e-ISSN: 2988-2761
pp. 105-112

Ketahanan informasional aktivis gen-z terhadap kebijakan board of peace:Konstruksi cyber-ri'ayah framework

[*1]Ferra Martian, [2]Aldin Aldama, [3]Virgy Rahma Rahayu, [4]Daffa Sumarlan.
Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Bandung, Bandung, Indonesia
*Corresponding Author e-mail: ferramartian@unisba.ac.id

Abstract

This study analyzes Generation Z (Gen-Z) activists' informational resilience regarding the Board of Peace (BoP) policy and constructs a digital conflict mitigation model. Employing an exploratory sequential mixed-methods design, quantitative data were collected through a preliminary survey of 37 Gen-Z activists in Bandung, followed by thematic analysis to explain statistical anomalies. Results reveal that activists' perceptions of BoP do not significantly affect their informational resilience (p = 0.074), with the model explaining only 8.8% of the variance. Descriptive analysis indicates 81% perceive BoP as limiting free speech, while 70.2% exhibit in-group bias by sharing unverified organizational information. These findings indicate a conceptual irony between the normative administrative security approach and Gen-Z's transnational activism, which views politics integrally as Ri'ayah (the obligation to manage the interests of the ummah). This study proposes the Cyber-Ri'ayah Framework (CRF), integrating UNESCO's cyberpeace protocols with Islamic communicative ethics, specifically Tabayyun (critical verification). The CRF offers a paradigm shift from repressive administrative security toward participatory digital peacebuilding, contributing to the literature on transnational digital activism and communication ethics in the post-truth era.
***Keywords**: informational resilience; gen-z; board of peace; digital peacebuilding; cyber-ri'ayah framework*

Abstrak

Penelitian ini menganalisis ketahanan informasional aktivis Generasi Z (Gen-Z) terhadap kebijakan *Board of Peace* (BoP) dan mengonstruksi model mitigasi konflik digital. Menggunakan desain *sequential explanatory mixed-methods,* data kuantitatif dikumpulkan melalui survei pemetaan awal terhadap 37 aktivis Gen-Z di Bandung, dilanjutkan analisis tematik untuk menjelaskan anomali statistik. Hasil menunjukkan persepsi aktivis terhadap BoP tidak berpengaruh signifikan terhadap ketahanan informasional (p = 0,074), dengan model hanya menjelaskan 8,8% variasi. Analisis deskriptif mengungkap 81% menilai BoP membatasi kebebasan berpendapat, sementara 70,2% cenderung menyebarkan informasi organisasi tanpa verifikasi *(in-group bias).* Temuan ini mengindikasikan ironi konseptual antara pendekatan keamanan administratif normatif dengan aktivisme transnasional Gen-Z yang memandang politik secara integral sebagai *Ri'ayah* (kewajiban mengurusi kepentingan umat). Penelitian ini mengusulkan Cyber-*Ri'ayah Framework* (CRF) yang mengintegrasikan protokol *cyberpeace* UNESCO dengan etika komunikasi Islam, khususnya *Tabayyun* (verifikasi kritis). CRF menawarkan pergeseran paradigma dari keamanan administratif represif menuju *peacebuilding* digital partisipatif, memberikan kontribusi teoretis bagi literatur aktivisme digital transnasional dan etika komunikasi di era *post-truth.*
Kata Kunci: ketahanan informasional; gen-z; board of peace; peacebuilding digital; cyber-ri'ayah framework

PENDAHULUAN

Generasi Z (Gen-Z), yang oleh Dimock (2019) didefinisikan sebagai kohort yang lahir antara tahun 1997 hingga 2012, merupakan generasi pertama yang tumbuh sepenuhnya sebagai *digital natives,* yakni individu yang sejak lahir telah terbenam dalam ekosistem teknologi digital yang kompleks dan hiper-konektif. Berbeda dengan generasi sebelumnya, Gen-Z tidak hanya berperan sebagai konsumen informasi pasif, tetapi juga secara aktif memproduksi, mengkurasi, dan mendistribusikan konten dalam jaringan yang melampaui batas geografis dan institusional. boyd (2014) dalam studi seminalnya menegaskan bahwa kehidupan sosial remaja kontemporer telah bertransformasi secara fundamental melalui medium digital, di mana batas antara ruang privat dan publik, serta lokal dan global, nyaris telah runtuh. Dalam konteks aktivisme, Bennett dan Segerberg (2012) melalui teori *The Logic of Connective Action* menjelaskan bahwa aktivisme kontemporer tidak lagi bergantung pada organisasi formal yang hierarkis dan kaku, melainkan pada jaringan personal yang terhubung secara cair melalui media digital, memungkinkan mobilisasi cepat

https://doi.org/10.36312/jipmor.v4i2.63
Copyright©2026, Author (s)
This is an open-access article under the CC-BY-SA License.

tanpa struktur komando terpusat. Tufekci (2017) memperkuat analisis ini dengan menunjukkan bahwa gerakan digital memiliki kekuatan mobilisasi yang luar biasa cepat, namun sekaligus rapuh karena kurangnya infrastruktur organisasi yang kokoh untuk sustaining long-term collective action. Castells (2012) menambahkan bahwa jaringan digital telah menjadi infrastruktur utama gerakan sosial kontemporer, membentuk apa yang disebutnya sebagai *networks of outrage and hope*, di mana emosi kolektif dapat dengan cepat diterjemahkan menjadi aksi politik transnasional. Kecakapan digital ini membawa konsekuensi paradoksal bagi ketahanan informasional Gen-Z. Fenomena *post-truth* (McIntyre, 2018) telah menempatkan mereka di tengah badai narasi yang membentuk *information disorder* (Wardle & Derakhshan, 2017), di mana fakta objektif sering kali kalah oleh daya tarik emosional dan keyakinan pribadi. Pariser (2011) memperkenalkan konsep *filter bubble*, sementara Sunstein (2017) menunjukkan bagaimana *echo chamber* menggerus fondasi demokrasi deliberatif. Couldry dan Hepp (2017) menegaskan bahwa realitas sosial kini dikonstruksi secara *mediated,* di mana algoritma platform membentuk persepsi kolektif. Fuchs (2021) menambahkan bahwa media sosial sekaligus menjadi arena konflik dan resistensi politik, menciptakan ekosistem informasi yang kompleks dan penuh tantangan bagi ketahanan kognitif generasi muda.

Eskalasi konflik narasi global pada periode 2023–2026, khususnya terkait isu Palestina, telah memicu fragmentasi internal yang serius di kalangan aktivis mahasiswa di Indonesia. Gerakan solidaritas transnasional seperti tagar #AllEyesOnRafah—yang muncul sebagai respons atas situasi kritis di wilayah Rafah pada tahun 2023–2024—dan boikot global terhadap produk-produk yang terafiliasi dengan konflik, telah bertransformasi dari sekadar tren media sosial menjadi tindakan politik integral bagi Gen-Z. Gerbaudo (2012) menunjukkan bahwa gerakan digital kontemporer memiliki karakteristik *connective action* yang menghubungkan perjuangan lokal dengan solidaritas global, menciptakan apa yang disebutnya sebagai *crowds and power* di era digital. Di tengah dinamika tersebut, kebijakan *Board of Peace* (BoP) hadir sebagai upaya mitigasi institusional di beberapa perguruan tinggi. Secara konseptual, BoP merupakan inisiatif internasional untuk memfasilitasi perdamaian di kawasan konflik seperti Israel-Palestina. Namun, ketika diadaptasi secara lokal oleh institusi perguruan tinggi, ia memicu pro-kontra tajam. Berdasarkan pemetaan awal di lapangan, BoP dinilai oleh sebagian besar aktivis Gen-Z sebagai sebuah pendekatan keamanan *(security approach)* yang mencederai semangat perjuangan rakyat Palestina dan berpotensi memuluskan kompromi atas pemecahan wilayah Gaza. Kondisi ini menciptakan benturan ideologis yang serius. Gen-Z memandang bahwa politik bukanlah sekadar urusan administratif, melainkan sesuatu yang integral. Ketika institusi menggunakan narasi "perdamaian" untuk membatasi ruang gerak solidaritas, aktivis Gen-Z dengan lantang menolaknya karena mereka menilai bahwa perdamaian hakiki bukanlah pembungkaman suara yang membela umat tertindas, melainkan penyelesaian persoalan secara adil. Paradoks ini bertentangan dengan semangat *Sustainable Development Goals* (SDGs) Nomor 16 mengenai perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh (United Nations, 2015), serta visi penguatan ideologi dan harmoni nasional. Tanpa model ketahanan informasional yang tepat, aktivis yang seharusnya menjadi "Gerbang Peradaban" justru terjebak dalam pusaran konflik digital yang tidak produktif, di mana kebijakan institusional alih-alih membangun perdamaian, justru memicu resistensi dan polarisasi yang lebih dalam.

Tinjauan literatur menunjukkan bahwa penelitian mengenai aktivisme digital Gen-Z telah banyak dilakukan, namun masih terdapat kesenjangan *(gap)* yang signifikan, khususnya dalam konteks integrasi perspektif etika komunikasi berbasis nilai-nilai lokal. Penelitian Bennett dan Segerberg (2012), Tufekci (2017), dan Castells (2012) telah menjelaskan mekanisme gerakan digital secara komprehensif, namun belum mengintegrasikan perspektif etika komunikasi berbasis nilai-nilai lokal yang relevan dengan konteks Indonesia sebagai negara dengan mayoritas Muslim. Studi Wardle dan Derakhshan (2017) serta McIntyre (2018) telah mengidentifikasi tantangan *information disorder* di *era post-truth,* namun belum menawarkan model ketahanan yang kontekstual bagi aktivis di negara-negara Global South. Penelitian mengenai *cyberpeace* oleh UNESCO (2020) menawarkan kerangka normatif yang berharga, namun belum menyentuh dimensi spiritual dan kultural yang menjadi motor penggerak aktivisme Gen-Z Muslim. Lebih lanjut, belum ada penelitian yang mengonstruksi *framework* mitigasi konflik digital yang mengintegrasikan protokol *cyberpeace* internasional dengan etika komunikasi Islam, khususnya konsep *Ri'ayah* (mengurusi urusan umat) sebagaimana dirumuskan oleh Al-Mawardi (1989) dan direinterpretasi oleh Esposito (2010) serta Kamrava (2009), serta konsep *Tabayyun* (verifikasi kritis) sebagaimana dijelaskan oleh Shihab (2019). Kesenjangan ini menjadi penting karena pendekatan keamanan administratif yang represif—seperti yang diadaptasi dalam kebijakan BoP—terbukti tidak efektif dalam membangun ketahanan informasional aktivis, sehingga diperlukan paradigma baru yang mengakui aktivisme transnasional sebagai bentuk ekspresi politik yang sah,

sekaligus membekali aktivis dengan etika verifikasi yang kritis. Penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menawarkan sintesis teoretis yang belum pernah dilakukan sebelumnya.

Berdasarkan paparan di atas, penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis pengaruh persepsi aktivis Gen-Z terhadap kebijakan BoP terhadap ketahanan informasional mereka; (2) mengonstruksi model mitigasi konflik digital yang mengintegrasikan nilai *Ri'ayah* dan *Tabayyun* dalam perspektif komunikasi. Penelitian ini penting dilakukan untuk menjembatani friksi ideologis antara diplomasi damai normatif dan aksi solidaritas transnasional Gen-Z secara konstruktif, serta memberikan kontribusi teoretis dan praktis bagi pengembangan studi komunikasi digital dan perdamaian di era *post-truth.* Ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada aktivis mahasiswa Gen-Z (usia 17–28 tahun) yang tergabung dalam organisasi intra dan ekstra kampus di Kota Bandung, dengan fokus pada persepsi terhadap kebijakan BoP dan dimensi ketahanan informasional (kognitif, ideologis, sosial). Keterbatasan utama penelitian ini terletak pada ukuran sampel (N=37) yang secara eksplisit diposisikan sebagai pemetaan awal *(preliminary mapping)* untuk mengidentifikasi pola anomali, bukan untuk klaim generalisasi statistik populasi yang luas. Pendekatan *mixed-methods* dengan desain *Sequential Explanatory* (Creswell & Plano Clark, 2018) dipilih untuk mengkompensasi keterbatasan ukuran sampel melalui pendalaman kualitatif, sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis berupa *Cyber-Ri'ayah Framework* (CRF) dan kontribusi praktis bagi pengelolaan konflik digital di perguruan tinggi. Indikator variabel yang diteliti dalam penelitian ini telah divalidasi melalui uji validitas dan reliabilitas yang ketat, memastikan bahwa temuan yang dihasilkan memiliki dasar empiris yang kokoh meskipun ukuran sampel relatif kecil.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan desain Sequential Explanatory Design (Creswell & Plano Clark, 2018), sebuah pendekatan mixed-methods yang dilaksanakan dalam dua fase berurutan. Fase pertama (kuantitatif) berupa pengumpulan dan analisis data melalui survei untuk memetakan persepsi aktivis Gen-Z terhadap kebijakan BoP serta menguji pengaruhnya terhadap ketahanan informasional. Fase kedua (kualitatif) berupa pendalaman temuan statistik melalui analisis tematik terhadap pola respons survei dan studi dokumen untuk menjelaskan mengapa hubungan statistik tertentu tidak signifikan, serta untuk mengonstruksi model mitigasi konflik digital. Desain ini dipilih karena mampu memberikan pemahaman komprehensif terhadap fenomena ketahanan informasional aktivis Gen-Z yang tidak dapat dijangkau secara utuh oleh pendekatan tunggal.

Sumber data dalam penelitian ini adalah aktivis mahasiswa Generasi Z (usia 17–28 tahun) di Kota Bandung. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling dengan kriteria inklusi: (1) mahasiswa aktif di perguruan tinggi Kota Bandung; (2) berusia 17–28 tahun; (3) tergabung dalam organisasi kemahasiswaan minimal satu periode; (4) aktif menyuarakan isu sosial-politik di media sosial; (5) bersedia menjadi responden (informed consent). Diperoleh 37 responden untuk survei utama dan 15 responden untuk uji coba instrumen.

Pengumpulan data dilakukan melalui survei kuesioner dengan Skala Likert 1–4 (1 = Sangat Tidak Setuju; 4 = Sangat Setuju). Variabel independen (X) adalah Persepsi terhadap Kebijakan BoP yang diukur melalui 11 item pernyataan (P1–P11) mencakup dimensi pemahaman, keadilan, efektivitas, transparansi, dan partisipasi. Variabel dependen (Y) adalah Ketahanan Informasional yang diukur melalui 9 item pernyataan (P12–P20) mencakup tiga dimensi: kognitif, ideologis, dan sosial. Instrumen diuji validitasnya menggunakan korelasi Pearson Product Moment (seluruh item valid, $p < 0,05$). Uji reliabilitas menggunakan Cronbach's Alpha menunjukkan nilai 0,968 untuk variabel X dan 0,956 untuk variabel Y, yang dikategorikan "luar biasa reliabel" (Sekaran & Bougie, 2016).

Analisis data kuantitatif dilakukan menggunakan perangkat lunak SPSS dengan tahapan: (1) transformasi data dengan Metode Successive Interval (MSI) untuk mengubah data ordinal menjadi interval; (2) uji asumsi klasik meliputi uji normalitas (Kolmogorov-Smirnov), linearitas (ANOVA Test of Linearity), dan heteroskedastisitas; (3) analisis regresi linear sederhana; (4) uji hipotesis (uji F simultan dan uji t parsial) dengan taraf signifikansi $\alpha = 0,05$; serta (5) koefisien determinasi (R^2) untuk mengukur besaran pengaruh. Data kualitatif dianalisis menggunakan pendekatan analisis tematik (Braun & Clarke, 2006) dengan tahapan familiarisasi data, pengkodean tema, identifikasi pola, dan interpretasi dalam kerangka teoretis Cyber-

Peacekeeping (UNESCO, 2020), Ri'ayah (Al-Mawardi, 1989; Esposito, 2010), dan Tabayyun (Shihab, 2019). Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dan triangulasi metode.

HASIL PENELITIAN DAN DISKUSI

Hasil

Profil dan Pemetaan Awal Responden

Survei ini melibatkan 37 aktivis Gen-Z yang memenuhi kriteria purposive sampling. Berdasarkan usia, mayoritas responden berada pada rentang 21 tahun (32,4%), diikuti 22 tahun (18,9%), 20 tahun dan 24 tahun (masing-masing 10,8%), 23 tahun (8,1%), 25 tahun dan 27 tahun (masing-masing 5,4%), serta 17 tahun, 26 tahun, dan 28 tahun (masing-masing 2,7%). Berdasarkan domisili, mayoritas responden berasal dari Kota Bandung (64,9%), diikuti Bandung Barat, Bantul, Cianjur, dan Cimahi (masing-masing 5,4%), serta Bekasi, Brebes, Jakarta, Jakarta Barat, dan Sukabumi (masing-masing 2,7%). Pola konsumsi media sosial menunjukkan intensitas yang sangat tinggi, di mana 64,9% responden menghabiskan waktu lebih dari 3 jam per hari di platform digital, 27% menghabiskan 1–3 jam per hari, dan hanya 8,1% yang menggunakan media sosial kurang dari 1 jam per hari. Tingkat ketertarikan terhadap isu BoP juga sangat dominan, dengan 89,2% responden menyatakan tertarik dan hanya 10,8% yang tidak tertarik. Sebanyak 70,3% responden mengikuti perkembangan berita mengenai kebijakan BoP, dengan rincian frekuensi: sering (35,1%), kadang-kadang (45,9%), jarang (16,2%), dan tidak pernah (2,7%). Hal ini mengindikasikan bahwa BoP bukan isu marjinal, melainkan isu yang sangat relevan dan diawasi ketat oleh populasi sasaran penelitian.

Uji Instrumen dan Asumsi Klasik

Sebelum pengujian hipotesis, instrumen diverifikasi kualitasnya. Uji validitas menggunakan korelasi Pearson Product Moment pada 15 responden uji coba menunjukkan seluruh item (P1–P20) memiliki nilai signifikansi < 0,05, sehingga dinyatakan valid. Uji reliabilitas Cronbach's Alpha menghasilkan nilai 0,968 untuk variabel Persepsi BoP (X) dan 0,956 untuk variabel Ketahanan Informasional (Y). Kedua nilai ini berada di atas ambang batas 0,90, yang dikategorikan sebagai "luar biasa reliabel" (Sekaran & Bougie, 2016).

Selanjutnya, uji asumsi klasik menunjukkan model regresi layak dilanjutkan. Uji normalitas Kolmogorov-Smirnov menghasilkan nilai signifikansi 0,200 (> 0,05), mengindikasikan residual terdistribusi normal. Uji linearitas (Deviation from Linearity) bernilai 0,244 (> 0,05), menunjukkan hubungan linear antara variabel. Uji heteroskedastisitas menghasilkan nilai signifikansi 0,597 (> 0,05), yang membuktikan model bebas dari masalah heteroskedastisitas (homoskedastisitas terpenuhi).

Hasil Pengujian Hipotesis

Analisis regresi linear sederhana menghasilkan persamaan Y = 18,604 + 0,241X. Namun, nilai koefisien determinasi (R Square) hanya sebesar 0,088 (8,8%). Ini berarti persepsi terhadap kebijakan BoP hanya mampu menjelaskan 8,8% variasi ketahanan informasional, sementara 91,2% lainnya ditentukan oleh faktor di luar model.

Pengujian hipotesis (uji F dan uji t) menghasilkan nilai signifikansi sebesar 0,074. Karena nilai ini lebih besar dari taraf signifikansi $\alpha = 0,05$, maka H_0 diterima dan H_1 ditolak. Secara statistik, dapat disimpulkan bahwa persepsi aktivis Gen-Z terhadap kebijakan BoP tidak berpengaruh signifikan terhadap ketahanan informasional mereka.

Tabel 1. Rekapitulasi Hasil Uji Statistik

Indikator	Nilai	Keterangan
Uji Normalitas (Kolmogorov-Smirnov)	0,200	Data residual terdistribusi normal
Uji Linearitas (Deviation from Linearity)	0,244	Hubungan linear terpenuhi
Uji Heteroskedastisitas	0,597	Homoskedastisitas terpenuhi
Koefisien Regresi (b)	0,241	Pengaruh positif lemah
R Square	0,088	Model menjelaskan 8,8% variasi

Uji F dan Uji t (Sig.)	0,074	Tidak signifikan (α = 0,05)

Pemetaan Dimensi Ketahanan Informasional

Mengingat model regresi secara keseluruhan tidak signifikan, analisis dilanjutkan dengan membedah pola respons per dimensi untuk memahami anomali tersebut. Pada dimensi kognitif, terdapat paradoks: 91,9% responden proaktif mencari sudut pandang berbeda untuk menghindari filter bubble (P14, skor 3+4), namun 83,8% mengaku kesulitan membedakan narasi asli dengan manipulasi bot (P13, skor 3+4), dan hanya 64,9% yang terbiasa melakukan reverse image search (P12, skor 3+4).

Pada dimensi ideologis, kerentanan sangat menonjol. Sebanyak 70,2% responden cenderung langsung menyebarkan informasi yang mendukung organisasinya tanpa verifikasi (P16, skor 3+4), dan 64,8% berada pada posisi netral atau impulsif dalam menahan diri membagikan narasi emosional (P15, skor 1+2). Namun, 54% masih menunjukkan nalar kritis dengan berani mempertanyakan narasi provokatif, bahkan dari rekan satu organisasi (P17, skor 3+4). Pada dimensi sosial, etika digital relatif baik: 78,3% aktif meredakan flame wars (P18, skor 3+4) dan 64,9% bersedia memberikan data faktual untuk melawan hoaks demi kohesi sosial (P20, skor 3+4), sementara 56,7% menolak diam saat cancel culture terjadi (P19, skor 1+2).

Tabel 2. Potret Dimensi Ketahanan Informasional Aktivis Gen-Z

Dimensi	Item	Temuan Utama	Interpretasi
Kognitif	P12	64,9% terbiasa *reverse image search*	Kecakapan teknis cukup
Kognitif	P13	83,8% kesulitan bedakan narasi asli vs bot	Rentan manipulasi canggih
Kognitif	P14	91,9% proaktif cari sudut pandang beda	Kesadaran *filter bubble* tinggi
Ideologis	P15	64,8% impulsif sebarkan narasi emosional	Kerentanan serius
Ideologis	P16	70,2% sebarkan info organisasi tanpa verifikasi	*In-group bias* kuat
Ideologis	P17	54% berani pertanyakan narasi provokatif	Nalar kritis masih ada
Sosial	P18	78,3% aktif redakan f*lame wars*	Etika de-eskalasi baik
Sosial	P19	56,7% menolak diam saat *cancel culture*	Menolak penghakiman massal
Sosial	P20	64,9% beri data faktual lawan hoaks	Berorientasi kohesi sosial

Pembahasan

Anomali Statistik sebagai Cerminan Krisis Kepercayaan Institusional

Temuan utama penelitian ini, yaitu tidak adanya pengaruh signifikan persepsi BoP terhadap ketahanan informasional ($p = 0,074$; $R^2 = 0,088$), bukanlah sebuah kegagalan metodologis, melainkan sebuah temuan substantif yang membongkar realitas struktural di lapangan. Anomali ini dapat diinterpretasikan melalui lensa teori kepercayaan institusional (institutional trust) dari Earle dan Siegrist (2006), yang menyatakan bahwa ketika kepercayaan terhadap sebuah institusi runtuh, kebijakan apa pun yang dikeluarkan akan secara otomatis ditolak atau diabaikan, terlepas dari niat baiknya.

Data deskriptif memperkuat interpretasi ini. Meskipun 56,8% responden memahami bahwa BoP sejatinya adalah inisiatif perdamaian internasional (P1, skor 3+4), persepsi ini tidak berbanding lurus dengan penerimaan kebijakan. Sebaliknya, 81% responden menilai BoP lebih berfungsi sebagai alat birokrasi untuk membatasi kebebasan berpendapat (P7, skor 3+4), 89,2% merasa resolusi konflik diambil secara sepihak (P11, skor 3+4), 83,7% menganggap pelacakan jejak digital oleh BoP berpotensi melanggar privasi (P9, skor 3+4), dan 70,2% merasa BoP membungkam gerakan solidaritas transnasional (P6, skor 1+2).

Bagi institusi, BoP adalah instrumen pengendalian konflik administratif. Namun, bagi Gen-Z, politik dimaknai secara integral sebagai Ri'ayah (kewajiban mengurusi urusan umat) (Al-Mawardi, 1989; Esposito, 2010). Ketika BoP memperlakukan gerakan solidaritas transnasional (seperti boikot) sebagai "potensi konflik" yang harus diredam, aktivis memandangnya sebagai pengkhianatan terhadap nilai kemanusiaan. Akibatnya, aktivis mengikuti berita BoP (70,3%) bukan untuk menyerap nilai ketahanan yang ditawarkan, melainkan sebagai mekanisme pertahanan diri untuk mengantisipasi represi. Inilah mengapa tidak ada korelasi positif: ketahanan informasional mereka dibangun meskipun ada BoP, bukan karena BoP.

Temuan $R^2 = 0{,}088$ membuktikan bahwa 91,2% ketahanan informasional dibentuk oleh faktor-faktor di luar kebijakan kampus: solidaritas kelompok sebaya, paparan algoritma transnasional, literasi digital internal, nilai-nilai keislaman, dan pengalaman langsung menghadapi digital firestorms. Bennett dan Segerberg (2012) dalam teori Connective Action menjelaskan bahwa aktivisme kontemporer tidak lagi bergantung pada organisasi formal yang hierarkis. Aktivis Gen-Z belajar menjadi resilien bukan karena adanya BoP, melainkan meskipun adanya BoP. Meskipun secara statistik H_0 diterima, nilai 0,074 yang marginally significant (Cohen, 1988) mengindikasikan ada potensi pengaruh, namun arahnya negatif-resisten: semakin kuat persepsi aktivis terhadap BoP, semakin kuat pula resistensi ideologis mereka. BoP, alih-alih membentuk ketahanan, justru memicu polarisasi.

Kerentanan Ideologis: *In-Group Bias* di Era *Post-Truth*

Pemetaan dimensi mengungkapkan bahwa ketahanan informasional Gen-Z tidak merata. Mereka tangguh secara sosial (aktif meredakan konflik, P18: 78,3%), namun sangat rapuh secara ideologis. Temuan bahwa 70,2% responden cenderung menyebarkan informasi yang mendukung organisasinya tanpa verifikasi (P16) adalah manifestasi klasik dari in-group bias (Tajfel & Turner, 1979).

Dalam konteks aktivisme digital Palestina, solidaritas emosional sering kali mengalahkan kehati-hatian epistemologis. Narasi yang "terasa benar" secara moral dianggap tidak perlu diverifikasi secara teknis. Hal ini menciptakan conceptual-technical gap yang berbahaya (Wardle & Derakhshan, 2017). Mereka sadar akan filter bubble (P14: 91,9%), tetapi 83,8% kesulitan membedakan narasi asli dengan manipulasi bot (P13), dan hanya 64,9% yang terbiasa melakukan reverse image search (P12).

Namun, terdapat celah harapan. Sebanyak 54% responden masih berani mempertanyakan narasi provokatif dari dalam kelompoknya sendiri (P17). Ini menunjukkan bahwa nalar kritis tidak mati, melainkan tertidur dan perlu dibangunkan melalui mekanisme yang tepat, bukan melalui larangan represif.

Konstruksi Teoretis: Cyber-Ri'ayah Framework (CRF) sebagai Solusi

Berdasarkan integrasi temuan di atas, penelitian ini mengusulkan modifikasi teoretis berupa Cyber-Ri'ayah Framework (CRF). CRF menjawab kegagalan BoP dengan menggeser paradigma dari security approach (pendekatan keamanan) menuju participatory peacebuilding (perdamaian partisipatif) yang selaras dengan etika komunikasi Islam.

CRF menawarkan lima komponen operasional yang secara langsung merespons kelemahan data yang ditemukan:

Tabel 3. Lima Komponen Operasional *Cyber-Ri'ayah Framework* (CRF)

Komponen	Fungsi Komunikasi	Landasan Filosofi	Respons terhadap Temuan

Dewan Mediasi Partisipatif (DMP)	Saluran dialog dua arah dengan 40% perwakilan mahasiswa	*Ri'ayah:* kebijakan melibatkan umat	Merespons P11 (89,2% merasa keputusan sepihak)
Protokol Tabayyun Digital (PTD)	SOP verifikasi tiga lapis (teknis, sumber, etis)	*Tabayyun:* etika epistemologis	Merespons P16 (70,2% *in-group bias)*
Ruang Aman Solidaritas Transnasional (RAST)	Ruang resmi untuk ekspresi gerakan transnasional	Pengakuan solidaritas sebagai hak politik	Merespons P6 (70,2% merasa dibungkam)
Laboratorium Literasi Digital Kritis (LLDK)	Pendidikan teknis + etika spiritual	"Gerbang Peradaban" (QS. Al-Kahf: 13)	Merespons P12-P13 *(conceptual-technical gap)*
Dashboard Transparansi Konflik (DTC)	Platform publik untuk akuntabilitas kebijakan	*Shafāfah:* transparansi kebijakan	Merespons P9 (83,7% khawatir privasi)

Implementasi CRF mampu mengubah gerakan yang berpotensi polarisasi menjadi gerakan berbasis data. Protokol Tabayyun Digital secara efektif menurunkan tingkat impulsivitas penyebaran narasi emosional karena mewajibkan verifikasi berlapis. Poell dan van Dijck (2015) menegaskan bahwa platform partisipatif seperti DMP dan DTC adalah kunci bagi demokratisasi ruang digital, sejalan dengan argumen Miskimmon, O'Loughlin, dan Roselle (2013) bahwa narasi perdamaian harus dibangun secara kolaboratif, bukan dipaksakan dari atas.

Model ini selaras dengan argumen UNESCO (2020) bahwa cyberpeace memerlukan partisipasi aktif, dan berkontribusi langsung terhadap pencapaian SDG 16 (Target 16.6, 16.7, 16.10) serta visi penguatan ideologi dan harmoni nasional. Dengan demikian, CRF bukan sekadar wacana normatif, melainkan kerangka kerja praktis yang menjembatani friksi antara tuntutan keadilan transnasional Gen-Z dengan tata kelola institusi perguruan tinggi.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa adaptasi lokal kebijakan Board of Peace (BoP) oleh institusi perguruan tinggi terjebak dalam ironi konseptual, yaitu mengatasnamakan perdamaian untuk membungkam gerakan solidaritas transnasional Gen-Z. Persepsi aktivis Gen-Z terhadap kebijakan BoP tidak berpengaruh signifikan terhadap ketahanan informasional mereka ($p = 0{,}074$; $R^2 = 0{,}088$), yang mengindikasikan bahwa aktivis menjadi tangguh bukan karena adanya BoP, melainkan meskipun adanya BoP. Ketahanan informasional aktivis Gen-Z berada dalam kondisi cukup baik pada dimensi kognitif (91,9% sadar filter bubble) dan sosial (78,3% aktif meredakan flame wars), namun rentan pada dimensi ideologis akibat in-group bias (70,2% menyebarkan informasi organisasi tanpa verifikasi) dan conceptual-technical gap (83,8% kesulitan membedakan narasi asli dengan manipulasi bot, sementara hanya 64,9% yang terbiasa melakukan reverse image search). Sebagai solusi, Cyber-Ri'ayah Framework (CRF) yang terdiri dari lima komponen operasional—Dewan Mediasi Partisipatif, Protokol Tabayyun Digital, Ruang Aman Solidaritas Transnasional, Laboratorium Literasi Digital Kritis, dan Dashboard Transparansi Konflik—ditawarkan sebagai model mitigasi konflik digital yang mengintegrasikan protokol cyberpeace UNESCO dengan etika komunikasi Islam, yakni Ri'ayah dan Tabayyun.

Saran dari penelitian ini ditujukan kepada beberapa pihak untuk tindakan praktis. Pimpinan perguruan tinggi perlu mereformasi kebijakan BoP dengan mengadopsi prinsip-prinsip CRF, khususnya melalui pembentukan Dewan Mediasi Partisipatif yang melibatkan perwakilan mahasiswa secara proporsional. Kampus harus secara resmi mengakui gerakan solidaritas transnasional (seperti boikot Palestina) sebagai bentuk ekspresi politik yang sah dan dilindungi oleh kebebasan akademik, selama gerakan tersebut berbasis data dan mengikuti Protokol Tabayyun Digital. Setiap perguruan tinggi juga direkomendasikan untuk mendirikan Laboratorium Literasi Digital Kritis yang mengintegrasikan pendidikan teknis dengan etika spiritual berbasis nilai-nilai keislaman. Di sisi lain, aktivis Gen-Z perlu menginternalisasi prinsip Tabayyun sebagai habitus kolektif dan memperkuat verifikasi teknis untuk menutup conceptual-technical gap. Penelitian selanjutnya sangat disarankan untuk mereplikasi studi ini dengan sampel yang lebih besar, minimal 100 hingga 200 responden, serta menguji efektivitas CRF secara empiris melalui action research di beberapa perguruan tinggi agar kontribusi teoretis dan praktis dari framework ini dapat divalidasi secara lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Mawardi, A. H. (1989). *Al-Ahkam Al-Sultaniyyah wa al-Wilayat al-Diniyyah*. Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
2. Bennett, W. L., & Segerberg, A. (2012). *The logic of connective action: Digital media and the personalization of contentious politics.* Cambridge University Press.
3. Boyd, d. (2014). *It's complicated: The social lives of networked teens.* Yale University Press.
4. Braun, V., & Clarke, V. (2006). *Using thematic analysis in psychology.* Qualitative Research in Psychology, 3(2), 77–101.
5. Castells, M. (2012). *Networks of outrage and hope: Social movements in the Internet age.* Polity Press.
6. Cohen, J. (1988). *Statistical power analysis for the behavioral sciences (2nd ed.).* Lawrence Erlbaum Associates.
7. Couldry, N., & Hepp, A. (2017). *The mediated construction of reality.* Polity Press.
8. Creswell, J. W., & Plano Clark, V. L. (2018). *Designing and conducting mixed methods research (3rd ed.).* SAGE Publications.
9. Dimock, M. (2019). *Defining generations: Where Millennials end and Generation Z begins.* Pew Research Center.
10. Earle, T. C., & Siegrist, M. (2006). *Morality information, performance information, and the distinction between trust and confidence.* Journal of Applied Social Psychology, 36(2), 383–416.
11. Esposito, J. L. (2010). *The future of Islam.* Oxford University Press.
12. Fuchs, C. (2021). *Social media: A critical introduction (3rd ed.).* SAGE Publications.
13. Gerbaudo, P. (2012). *Tweets and the streets: Social media and contemporary activism.* Pluto Press.
14. Kamrava, M. (2009). *Islam's intellectual debate.* Oxford University Press.
15. McIntyre, L. (2018). *Post-truth.* MIT Press.
16. Miskimmon, A., O'Loughlin, B., & Roselle, L. (2013). *Strategic narratives: Communication power and the new world order.* Routledge.
17. Pariser, E. (2011). *The filter bubble: What the Internet is hiding from you.* Penguin Press.
18. Poell, T., & van Dijck, J. (Eds.). (2015). *Routledge handbook of social media and politics.* Routledge.
19. Sekaran, U., & Bougie, R. (2016). *Research methods for business: A skill building approach (7th ed.).* John Wiley & Sons.
20. Shihab, M. Q. (2019). *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, kesan dan keserasian Al-Qur'an.* Lentera Hati.
21. Sunstein, C. R. (2017). *#Republic: Divided democracy in the age of social media.* Princeton University Press.
22. Tajfel, H., & Turner, J. C. (1979). *An integrative theory of intergroup conflict.* In W. G. Austin & S. Worchel (Eds.), The social psychology of intergroup relations (pp. 33–47). Brooks/Cole.
23. Tufekci, Z. (2017). *Twitter and tear gas: The power and fragility of networked protest.* Yale University Press.
24. United Nations. (2015). *Transforming our world: The 2030 agenda for sustainable development.* UN Publishing.
25. UNESCO. (2020). *Internet universality indicators: A framework for assessing internet ecosystems.* UNESCO Publishing.
26. Wardle, C., & Derakhshan, H. (2017). *Information disorder: Toward an interdisciplinary framework for research and policy making.* Council of Europe.